20. Standar Pelayanan Izin Klinik/Rumah Sakit Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional

	Internasional Komponen Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian	
	Persyaratan Pelayanan	Surat Izin Operasional Klinik/Rumah sakit Dokter yang mempunyai sertifikat Vaksinologi yang masih berlaku Petugas/admin penerbit sertifikat ICV Sarana dan Prasarana	
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Petugas menerima Permohonan pengajuan dari klinik / Rumah sakit Petugas mendapatkan surat tugas dari pimpinan untuk melakukan verifikasi ke Klinik/Rumah sakit Tim verifikator melakukan Verifikasi Tim verifikator menyerahkan hasil verifikasi ke Katimker 4 Katimker 4 melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Balai Apabila hasil verifikasi memenuhi persyaratan maka Kepala Balai menerbitkan surat izin Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional. Namun apabila tidak memenuhi persyaratan, Kepala Balai memberikan rekomendasi kepada RS/Klinik untuk melengkapi persyaratan dan dapat mengajukan permohonan kembali. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindari segala bentuk benturan kepentingan 	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	 Apabila persyaratan terpenuhi surat Izin Penerbitan icv-e-icv diterbitkan dalam waktu paling lama 7 hari kerja Apabila Persyaratan belum terpenuhi maka diberikan rekomendasi untuk memenuhi kelengkapan sampai batas waktu 7 hari. 	
4.	Biaya/Tarif	Rp 0,-	
5.	Produk Layanan	Surat Izin Penerbitan ICV/e-ICV	
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpbanten.org hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 Whistle Blowing System SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten	
	Kompone	en Pengelolaan Pelayanan <i>(Manufacturing)</i>	
No.	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	 International Health Regulation Revisi Tahun 2005 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana 	

		Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan 6. Keputusan Dirjen Pengendalian Penyakit No.HK.02.02/C/344/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Surat Tugas 2. Form Verifikasi / Pemeriksaan klinik/RS (form 7a) 3. Form laporan hasil verifikasi (form 7b)
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter/Perawat,Sanitarian,Administrasi (Petugas Sinkarkes)
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI) Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 4 Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten
5.	Jumlah Pelaksana	3-4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan oleh Petugas BKK Banten
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 2 kali dalam 1 tahun Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 Bulan Sekali